



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016-2020**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada  
Program Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Jakarta

Disusun Oleh:  
Yusrina Darneli  
NIM. 4417030047

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Agustus 2022



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Yusrina Darneli

NIM : 4417030047

Tanda tangan :



Tanggal : 12 Agustus 2022

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Yusrina Darneli

NIM : 4417030047

Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Judul Skripsi : Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Titi Suhartati, S.E., M.M., M.Ak, Ak. (  )

Anggota Penguji : Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.Ak., CPIA. (  )

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Agustus 2022

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP 196404151990032002



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yusrina Darneli  
Nomor Induk Mahasiswa : 4417030047  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/ D4 Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020.

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.Ak., CPIA.  
NIP. 197202221999031003

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Ketua Program Studi  
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak.  
NIP 196302031990031001

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020” yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Terapan dapat penulis selesaikan.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh Jajaran Pimpinan Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.Ak., CPIA. selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan, waktu, dan motivasi dengan setulus hati kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar maupun administrasi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama masa perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
6. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak Durminto, S.Kom., M.H. dan Ibu Nenila B.Yos serta abang Farizan Luthfi dan adik Fakhrusy Ihsan atas segala bentuk do'a, dukungan, motivasi serta fasilitas baik materill maupun non-materill yang diberikan kepada penulis.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Ahmad Rizki Firdaus, S.Pd. yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
8. Firma Reza Fajriati, A.Md.T yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Seluruh teman-teman program studi D4 Akuntansi Keuangan Angkatan 2017 yang telah membantu selama perkuliahan serta memberikan semangat dan dukungan satu sama lain.
10. Seluruh keluarga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terutama Ibu Lisa Harmayanti, S.Si., M.H. dan Ibu Pebri Tripeni yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat serta mempermudah penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
11. Sahabat THE FEA Family yaitu Lyuvietha M.M., Nisa Fadhilatul Isra, Aranti Anggita, Sari Rahayu, Aris Junaidi, dan Moh. Alfiansyah yang selalu kebersamai dalam duka maupun suka serta selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas bantuan dan doa untuk penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulisan, skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi semua pihak yang berkenan memanfaatkannya. Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal yang tidak berkenan pada skripsi ini.

Depok, 12 Agustus 2022

Yusrina Darneli  
NIM. 4417030047



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusrina Darneli  
NIM : 4417030047  
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

Yang menyatakan

Yusrina Darneli



## ABSTRAK

Nama : Yusrina Darneli  
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan  
Judul : Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui kinerja keuangan Pemprov Sumatera Barat yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio ekonomis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diukur menggunakan (1) rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif, (2) rasio derajat desentralisasi berada di kategori sedang, (3) rasio efektivitas berada pada kategori efektif, (4) rasio efisiensi berada di kategori kurang efisien, (5) rasio ekonomis berada pada ketegori ekonomis.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Ekonomis

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## ABSTRACT

Name : Yusrina Darneli  
Study Program : Akuntansi Keuangan Terapan  
Title : *Provincial Government Financial Performance Assessment West Sumatera Fiscal Year 2016-2020*

*This study aims to assess and determine the financial performance of the West Sumatra Provincial Government as measured by the ratio of regional financial independence, the ratio of the degree of decentralization, the ratio of effectiveness, the ratio of efficiency and the economic ratio. This study uses descriptive quantitative methods using documentation techniques for data collection. The data used is secondary data in the form of a Report on the Realization of the Regional Government Revenue and Expenditure Budget for the Province of West Sumatra for the 2016-2020 Fiscal Year. The results showed that the assessment of the financial performance of the West Sumatra Provincial Government as measured using (1) the ratio of regional financial independence was in the medium category with a participatory relationship pattern, (2) the degree of decentralization ratio was in the medium category, (3) the effectiveness ratio was in the category effective, (4) the efficiency ratio is in the less efficient category, (5) the economic ratio is in the economic category.*

**Keywords:** *Regional Financial Performance, Regional Financial Independence Ratio, Decentralization Degree Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Economic Ratio*

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Keuangan Daerah .....	7
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	8
2.2.1 Anggaran Pendapatan Daerah .....	9
2.2.2 Anggaran Belanja Daerah.....	10
2.2.3 Pembiayaan.....	11
2.3 Laporan Realisasi Anggaran .....	11
2.4 Pengukuran Kinerja Sektor Publik .....	13
2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	14
2.6 Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	17

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	17
2.6.2 Rasio Derajat Desentralisasi .....	19
2.6.3 Rasio Efektivitas .....	20
2.6.4 Rasio Efisiensi .....	21
2.6.5 Rasio Ekonomis .....	22
2.7 Penelitian Terdahulu .....	23
2.8 Kerangka Pemikiran .....	26
BAB III METODE PENELITIAN .....	27
3.1 Jenis Penelitian .....	27
3.2 Objek Penelitian .....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	28
3.5 Metode Analisis Data .....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
4.1 Hasil Penelitian .....	30
4.2.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian .....	30
4.2 Hasil Penilaian dan Pembahasan Kinerja keuangan Daerah .....	32
4.2.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemprov Sumbar Menggunakan Rasio .....	32
4.2.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	32
4.2.1.2 Rasio Derajat Desentralisasi .....	34
4.2.1.3 Rasio Efektivitas .....	35
4.2.1.4 Rasio Efisiensi .....	37
4.2.1.5 Rasio Ekonomis .....	40
BAB V PENUTUP .....	42
5.1 Kesimpulan .....	42
5.2 Saran .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	45
LAMPIRAN .....	47



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Tren APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah).....	3
Tabel 2. 1	Klasifikasi Rasio Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah ....	18
Tabel 2. 2	Klasifikasi Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah .....	19
Tabel 2. 3	Klasifikasi Rasio Efektivitas Keuangan Daerah .....	20
Tabel 2. 4	Klasifikasi Rasio Efisiensi Keuangan Daerah .....	21
Tabel 2. 5	Klasifikasi Rasio Ekonomis Keuangan Daerah .....	22
Tabel 2. 6	Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4. 1	Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020.....	33
Tabel 4. 2	Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020.....	35
Tabel 4. 3	Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020.....	36
Tabel 4. 4	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020.....	38
Tabel 4. 5	Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020.....	41

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....26





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Sumatera Barat Tahun 2016 ...	47
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Sumatera Barat Tahun 2017 ...	49
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Sumatera Barat Tahun 2018 ...	51
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Sumatera Barat Tahun 2019 ...	52
Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Sumatera Barat Tahun 2020 ...	53



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semenjak diberlakukannya sistem pemerintahan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu ciri daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerahnya yaitu daerah tersebut harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan dan mengelola keuangan tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dan sudah mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat agar dapat mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya PAD yang menjadi sumber keuangan terbesar. Berdasarkan hal tersebut, maka peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Bastian (2010) anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Kinerja keuangan sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik. Penganggaran berbasis kinerja menuntut semua pemerintah daerah

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi Kurniawati (2016).

Penelitian ini mengambil objek pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan yang di dihadapi yaitu lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Permasalahan serupa selalu terjadi dari tahun ke tahun, sehingga pelaksanaan APDB belum berjalan sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan. Hal ini, menunjukkan tidak adanya evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga belum sungguh-sungguh mendorong peningkatan pendapatan daerah, terutama pada penerimaan deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sumbangan dari pihak ketiga. Selain itu masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengirim laporan keuangan yang tidak sesuai standar akuntansi dan belum tepat waktu serta belum menuntaskan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan daerah terutama terkait temuan-temuan yang merekomendasikan pengembalian uang Negara seperti kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas, kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan, pelaksanaan 3 paket pekerjaan gedung dan bangunan putus kontrak dan pengembalian uang muka serta jaminan pelaksanaan belum dicairkan, kelebihan pembayaran 17 paket pekerjaan jalan dan irigasi dan pemberian bantuan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di NTT yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga tidak sesuai ketentuan. (Sub bagian Humas TU Kalan BPK Sumbar, 2021)

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berikut tabel yang menggambarkan pendapatan dan belanja di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 1. 1 Tren APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020  
(dalam Rupiah)

	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	4.624.674.545.939,55	6.066.826.853.956,41	6.292.287.631.025,90	6.390.337.204.584,19	6.364.065.756.244,41
Belanja	4.504.037.258.760,43	5.759.818.392.400,62	6.267.376.231.091,09	6.551.278.880.635,32	6.408.293.788.337,93
Surplus (Defisit)	120.637.287.179,12	307.008.461.555,79	24.911.399.934,81	(160.941.676.051,13)	(44.228.032.093,52)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas terlihat tren APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami surplus terhadap pendapatan sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Pendapatan daerah pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.442.152.308.016,86 kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.225.460.777.069,49 kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.98.049.573.558,29 kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. (26.271.448.339,78). Namun terjadi defisit dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 pendapatan masih mengalami kenaikan dari tahun 2018 akan tetapi mengikuti meningkatnya belanja daerah yang melampaui pendapatannya. Hal ini disebabkan meningkatnya belanja operasi dan transfer. Di tahun 2020 pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, penurunan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, pajak retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan karena kebijakan selama Covid-19 untuk membatasi pergerakan masyarakat dan masih kurangnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja daerah pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan yang melebihi pendapatannya yang disebabkan meningkatnya belanja operasi yaitu pada akun belanja hibah dan belanja tidak terduga terkait adanya *refocusing* dan realokasi anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 pada Belanja Tak Terduga. Dengan pendapatan yang kecil



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

tersebut menunjukkan bahwa sumber-sumber keuangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Seharusnya ketika pertumbuhan pendapatan daerah semakin tinggi, maka pemerintah daerah mampu dalam meningkatkan kinerja pertumbuhan pendapatannya.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah sangat penting untuk diteliti setiap tahunnya agar dapat menilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola program dan kegiatan yang dilaksanakan. Bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif dan efisien serta pemerintah daerah sudah benar dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kinerja keuangan pemerintah daerah berguna dalam pengambilan keputusan dan pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran. Hasil laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan pemerintah akan di laporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian akan diperiksa lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kinerja keuangan sudah digunakan dengan semestinya dan dengan target yang sudah ditetapkan. Diperlukan juga pengukuran kinerja keuangan untuk melihat kemampuan keuangan pemerintah guna keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan serta merealisasikan program dan kegiatan dengan baik, menjadikan tolak ukur dalam mengatasi masalah yang ada di masa yang akan datang.

### 1.2 Rumusan Masalah

Penilaian kinerja keuangan daerah harus memuat data dan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pembuat keputusan seperti pihak internal maupun pihak eksternal agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 sampai 2020 masih mengalami defisit terhadap APBD karena masih belum mengontrol dan membatasi penggunaan belanja daerah yang berlebihan dan masih belum mengoptimalkan pendapatan daerahnya yang disebabkan lemahnya

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sumbangan dari pihak ketiga, serta masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengirim laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi dan belum tepat waktu serta belum menuntaskan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan daerah terutama terkait temuan-temuan yang merekomendasikan pengembalian uang negara. Maka harus dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap pencapaian kinerja keuangan daerah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mengelola keuangan daerah yang akan mempengaruhi pada kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun Anggaran 2016-2020 jika dinilai berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio ekonomis ?
2. Bagaimana hasil penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang dinilai berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio ekonomis pada tahun anggaran 2016-2020.
2. Untuk menginterpretasikan hasil dari pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat menjadikan salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat memperdalam penelitian tentang kinerja keuangan daerah.

### 1.6 Sistematika Penelitian

#### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

#### BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

#### BAB IV Pembahasan

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Provinsi Sumatera Barat, penilaian dan pengukuran kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan daerah, dan hasil pengukuran kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat selama tahun anggaran 2016-2020.

#### BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran atas penelitian yang dilakukan.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian penilaian dan pengukuran kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penilaian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020 menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2016 sampai 2020 berkisaran antara 50%-75% dikategorikan sedang dengan pola hubungan partisipatif, secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mulai mengurangi ketergantungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan sudah lebih memberdayakan sumber daya pemerintahannya dengan tingkat kemandirian yang sudah cukup memadai. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah maka telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat.
2. Hasil penilaian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020 menggunakan rasio derajat desentralisasi pada tahun 2016 sampai 2020 berkisar antara 30,01%-40,01% dikategorikan sedang, secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum cukup optimal dalam menjalankan desentralisasi dan belum membiayai pembangunan daerah setiap tahunnya. Semakin tinggi rasio derajat desentralisasi maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
3. Hasil penilaian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020 menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2016 sampai 2020 kisaran antara 90%-100% dikategorikan efektif, secara umum Provinsi Sumatera Barat mampu memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan tercapainya tujuan program dan kegiatan daerahnya serta kinerja dari pendapatan daerah sudah dijalankan sesuai dengan tujuannya dan cukup

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

optimal. Semakin tinggi tingkat rasio efektivitas maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

4. Hasil penilaian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020 menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2016 sampai 2018 berada dikisaran 90%-100% dengan kategori kurang efisien dan di tahun 2019-2020 berada di kisaran lebih dari 100% dikategorikan tidak efisien, secara umum hasil kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama periode tertentu belum bisa tercapai sesuai target menggunakan sumber daya dan dana seefisien mungkin dan belum mampu mengimbangi belanja daerah dengan penerimaan daerahnya sehingga terjadi defisit anggaran. Semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik
5. Hasil penilaian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020 menggunakan rasio ekonomis bahwa di tahun 2016 sampai 2020 berkisar antara 90%-100% yang dikategorikan ekonomis, secara umum Provinsi Sumatera Barat telah mengelola anggaran dengan cara yang ekonomis dan cukup optimal dalam pencapaian target belanja daerahnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan peneliti adalah :

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat lebih meningkatkan PAD, maka dari itu Provinsi Sumatera Barat sebaiknya lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, pajak retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai komponen penyumbang terbesar peningkatan PAD setiap tahunnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan pemungutan pajak serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar kewajiban pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan mengelola potensi-potensi daerah seperti penerimaan dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sumbangan dari pihak ketiga. Provinsi Sumatera Barat sebaiknya juga lebih meningkatkan pendapatan daerahnya dengan mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan program peningkatan pendapatan daerah, seperti pendirian BUMD sektor potensial.

- b. Provinsi Sumatera Barat juga di harapkan memperhatikan penggunaan anggaran belanja daerah terutama belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja hibah, belanja barang dan jasa dan belanja transfer sehingga dapat mengefisiensikan anggaran belanjanya dengan baik dan tidak terjadi penggunaan dana yang berlebihan untuk menjalankan program-programnya. Selain itu Provinsi Sumatera Barat diharapkan lebih memperhatikan tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dengan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja, serta bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana yang dikelolanya dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan observasi langsung ke pemerintah daerah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait agar mendapat informasi yang lebih rinci dan luas terkait kinerja keuangan pemerintah daerah.

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Z. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Periode 2011-2015*.
- Bappenas. (2003). *Pelayanan publik di Era Desentralisasi*. Deputi Bidang Polhamkan Bappenas
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Depdagri. (1997). *Kepmendagri No.600.900-327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Danuri, P. P., Maisaroh, S., & Prosa, P. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Samudra Biru (Anggota Biru).
- Fahmi, I. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan: Cetakan ketiga*. Bandung, Alfabeta.
- Grace B. Nangoi, I. E. (2016). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa the Analysis of Implementing Income Tax in Construction Service on Cv . Cakrawala*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(04), 169–180.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Restianto, Y. E., & Karman, I. W. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*.
- Hakim, M. F. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintahdaerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016*.
- Harmain, H., Daulay, A. N., & Enre, D. T. (2020). *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4(2).

<https://dpkd.sumbarprov.go.id>

<https://sumbar.bpk.go.id>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Kurniawati, N. (2016). Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintah Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Manajemen*, 3(1)
- Mahmudi, M. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.*
- Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Edisi Pert). *BPFE Yogyakarta.*
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1150–1182.
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Abdul, H., & Syam, K. (2012). Akuntansi Sektor Publik. *Salemba Empat*.
- Sumual, C. D., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. T. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2).
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.



Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Sumatera Barat Tahun 2020

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DES 2016 DAN 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2016 Audited)	%	TAHUN 2015 (Audited)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1,419,156,778.000.00	1,522,119,229,710.59	107.26	1,445,611,641,469.29
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	20,180,588,000.00	19,362,263,096.00	95.94	20,373,635,538.08
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	90,037,007.000.00	89,986,731,933.00	99.94	85,124,658,611.00
4.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	365,315,853,000.00	332,680,751,058.96	91.07	325,623,187,178.01
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1,894,690,226,000.00</b>	<b>1,964,148,975,798.55</b>	<b>103.67</b>	<b>1,876,733,122,796.38</b>
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat Dana				
4.2.1.	Perimbangan				
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	167,566,774,300.00	130,145,379,063.00	77.67	94,446,103,735.00
4.2.1.02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	20,700,000,000.00	4,354,936,047.00	21.04	12,570,605,642.00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	1,261,915,864,000.00	1,261,915,864,000.00	100.00	1,221,128,606,000.00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	1,197,202,026,000.00	1,180,338,806,000.00	98.59	62,731,100,000.00
4.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus				
4.2.2.02	Dana Penyesuaian	41,853,286,000.00	41,853,286,000.00	100.00	753,037,302,518.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2,689,237,950,300.00</b>	<b>2,618,608,271,110.00</b>	<b>97.37</b>	<b>2,143,913,717,895.00</b>
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
4.3.1.	Pendapatan Hibah	10,095,891,391.00	5,534,829,807.00	54.82	31,602,467,428.00
4.3.1.	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus				
	Bantuan Keuangan	12,499,950,000.00	12,499,950,000.00	100.00	
	Pendapatan Lainnya	23,882,519,224.00	23,882,519,224.00	100.00	
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>46,478,360,615.00</b>	<b>41,917,299,031.00</b>	<b>90.19</b>	<b>31,602,467,428.00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4,630,406,536,915.00</b>	<b>4,624,674,545,939.55</b>	<b>99.88</b>	<b>4,052,249,308,119.38</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	BELANJA OPERASI				
5.1.1.	Belanja Pegawai	737,096,578,421.86	704,125,019,416.00	95.53	772,736,510,573.00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	947,625,778,852.00	863,353,453,970.00	91.11	770,882,116,698.50
5.1.3.	Belanja Bunga				
5.1.4.	Belanja Subsidi				
5.1.5.	Belanja Hibah	1,127,736,170,162.00	1,111,246,182,514.00	98.54	898,590,914,414.00
5.1.6.	Bantuan Sosial				
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>2,812,458,527,435.86</b>	<b>2,678,724,655,900.00</b>	<b>95.24</b>	<b>2,442,209,541,685.50</b>
5.2.	BELANJA MODAL				
5.2.1.	Belanja Tanah	28,523,069,266.00	22,801,663,555.00	79.94	55,777,034,998.00
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	168,357,422,072.00	121,886,586,431.00	72.40	108,430,911,618.92
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	450,297,639,694.00	404,383,935,650.43	89.80	217,381,231,723.80
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	466,331,078,946.00	438,984,827,208.00	94.14	405,597,050,127.00
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,960,600,600.00	1,872,758,585.00	47.28	963,727,075.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1,117,469,810,578.00</b>	<b>989,929,771,429.43</b>	<b>88.59</b>	<b>788,149,955,542.72</b>
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	24,305,764,944.00	1,363,582,400.00	5.61	43,218,388.00
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>24,305,764,944.00</b>	<b>1,363,582,400.00</b>	<b>5.61</b>	<b>43,218,388.00</b>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TAHUN 2015 (Audited)
		TAHUN 2016	TAHUN 2016 Audited)		
6	TRANSFER				
6.1.	TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA				
6.1.1.	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota	698.437.477,681.00	698.437.477,681.00	100.00	669.370.829.226.00
6.1.2.	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota				
6.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/kota				
6.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda				
6.2.1.	Lainnya/ Parpol	154.231.947.750.00	135.581.771.350.00	87.91	122.483.415.540.00
6.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>852,669,425,431.00</b>	<b>834,019,249,031.00</b>	<b>97.81</b>	<b>791,854,244,766.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>4,806,903,528,388.86</b>	<b>4,504,037,258,760.43</b>	<b>93.70</b>	<b>4,022,256,960,382.22</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT LRA</b>	<b>(176,496,991,473.86)</b>	<b>120,637,287,179.12</b>	<b>(68.35)</b>	<b>29,992,347,737.16</b>
7	PEMBIAYAAN				
7.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
7.1.1.	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	251,496,991,473.86	251,496,991,473.86	100.00	274,104,643,736.70
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan				
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>251,496,991,473.86</b>	<b>251,496,991,473.86</b>	<b>100.00</b>	<b>274,104,643,736.70</b>
7.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan				
7.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	100.00	52,600,000,000.00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>75,000,000,000.00</b>	<b>75,000,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>52,600,000,000.00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>176,496,991,473.86</b>	<b>176,496,991,473.86</b>	<b>100.00</b>	<b>221,504,643,736.70</b>
	<b>SILPA PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>				
	<b>SEBELUM KOREKSI</b>		<b>297,134,278,652.98</b>		<b>251,496,991,473.86</b>
	<b>Koreksi SILPA</b>		<b>(12,491,079,881.62)</b>		<b>(22,031,756,798.62)</b>
	<b>SILPA PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>		<b>284,643,198,771.36</b>		<b>229,465,234,675.24</b>



GOVERNUR SUMATERA BARAT

IHWAN PRAYITNO

## Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Sumatera Barat Tahun 2017

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DES 2017 DAN 2016

NO	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan 2017	REALISASI TAHUN 2017 (Audited)	%	REALISASI TAHUN 2016 (Audited)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1,543,304,000,000.00	1,626,923,373,074.36	105.42	1,522,119,229,710.59
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	18,216,643,250.00	22,906,556,272.00	125.75	19,362,263,096.00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	98,871,708,000.00	94,610,436,713.08	95.69	89,986,731,933.00
4.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	402,382,939,000.00	389,570,153,443.97	96.82	332,680,751,058.96
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2,062,775,290,250.00</b>	<b>2,134,010,519,503.41</b>	<b>103.45</b>	<b>1,964,148,975,798.55</b>
4.2.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
4.2.1.	<b>Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan</b>				
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	149,130,342,000.00	139,094,073,993.00	93.27	130,145,379,063.00
4.2.1.02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	21,172,711,000.00	13,341,852,318.00	63.01	4,354,936,047.00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	2,014,646,639,000.00	2,014,646,639,000.00	100.00	1,261,915,864,000.00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	1,808,920,055,000.00	1,699,580,667,857.00	93.96	1,180,338,806,000.00
4.2.2.	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>				
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus				
4.2.2.02	Dana Penyesuaian	50,348,952,000.00	50,348,952,000.00	100.00	41,853,286,000.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4,044,218,699,000.00</b>	<b>3,917,012,185,168.00</b>	<b>96.85</b>	<b>2,618,608,271,110.00</b>
4.3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
4.3.1.	Pendapatan Hibah	25,487,360,000.00	15,804,149,285.00	62.01	5,534,829,807.00
4.3.1.	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus				
	Bantuan Keuangan				12,499,950,000.00
	Pendapatan Lainnya				23,882,519,224.00
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>25,487,360,000.00</b>	<b>15,804,149,285.00</b>	<b>62.01</b>	<b>41,917,299,031.00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6,132,481,349,250.00</b>	<b>6,066,826,853,956.41</b>	<b>98.93</b>	<b>4,624,674,545,939.55</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.1.	Belanja Pegawai	2,265,776,019,866.98	2,024,083,087,285.00	89.33	704,125,019,416.00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,343,465,863,223.00	1,216,893,627,987.46	90.58	863,353,453,970.00
5.1.3.	Belanja Bunga				
5.1.4.	Belanja Subsidi				
5.1.5.	Belanja Hibah	849,266,065,950.00	838,131,771,140.00	98.69	1,111,246,182,514.00
5.1.6.	Bantuan Sosial				
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>4,458,507,949,039.98</b>	<b>4,079,108,486,412.46</b>	<b>91.49</b>	<b>2,678,724,655,900.00</b>
5.2.	<b>BELANJA MODAL</b>				
5.2.1.	Belanja Tanah	5,448,238,271.00	271,462,061.00	4.98	22,801,663,555.00
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	306,426,992,801.00	230,427,833,027.16	75.20	121,886,586,431.00
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	339,379,139,686.00	308,779,364,240.00	90.98	404,383,935,650.43
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	309,951,310,872.00	276,798,925,142.00	89.30	438,984,827,208.00
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	19,614,352,940.00	15,899,783,347.00	81.06	1,872,758,585.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>980,820,034,570.00</b>	<b>832,177,367,817.16</b>	<b>84.85</b>	<b>989,929,771,429.43</b>
5.3.	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	60,433,885,322.00	1,228,779,200.00	2.03	1,363,582,400.00
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>60,433,885,322.00</b>	<b>1,228,779,200.00</b>	<b>2.03</b>	<b>1,363,582,400.00</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFER</b>				
6.1.	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA</b>				
6.1.1.	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota	759,780,368,221.00	759,780,368,221.00	100.00	698,437,477,681.00
6.1.2.	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota				
6.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/kota				
6.2.	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>				
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	65,236,000,000.00	58,319,000,000.00	89.40	118,715,380,600.00
6.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	30,248,000,000.00	27,615,000,000.00	91.30	15,277,000,000.00
6.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,589,390,750.00	1,589,390,750.00	100.00	1,589,390,750.00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>856,853,758,971.00</b>	<b>847,303,758,971.00</b>	<b>98.89</b>	<b>834,019,249,031.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>6,356,615,627,902.98</b>	<b>5,759,818,392,400.62</b>	<b>90.61</b>	<b>4,504,037,258,760.43</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT LRA</b>	<b>(224,134,278,652.98)</b>	<b>307,008,461,555.79</b>	<b>(136.98)</b>	<b>120,637,287,179.12</b>

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NO	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan 2017	REALISASI TAHUN 2017 (Audited)	%	REALISASI TAHUN 2016 (Audited)
7	PEMBIAYAAN				
7.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
7.1.1	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	297,134,278,652.98	297,134,278,652.98	100.00	251,496,991,473.86
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	297,134,278,652.98	297,134,278,652.98	100.00	251,496,991,473.86
7.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
7.2.1,	Pembentukan Dana Cadangan				
7.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	73,000,000,000.00	73,000,000,000.00	100.00	75,000,000,000.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	73,000,000,000.00	73,000,000,000.00	100.00	75,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	224,134,278,652.98	224,134,278,652.98	100.00	176,496,991,473.86
	SILPA PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	531,142,740,208.77		297,134,278,652.98



GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

## Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Sumatera Barat Tahun 2018

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DES 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan 2018	REALISASI TAHUN 2018 (Audited)	%	REALISASI TAHUN 2017 (Audited)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.736.164.000.000,00	1.797.677.158.644,95	103,54	1.626.923.373.074,36
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	16.909.923.600,00	19.506.412.108,00	115,35	22.906.556.272,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	122.000.000.000,00	81.374.332.350,87		
4.1.3.				66,70	94.610.436.713,08
4.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	468.494.718.000,00	376.532.165.483,08	80,37	389.570.153.443,97
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.343.568.641.600,00</b>	<b>2.275.090.068.586,90</b>	<b>97,08</b>	<b>2.134.010.519.503,41</b>
4.2.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan				
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	162.073.968.300,00	116.230.716.402,00	71,71	139.094.073.993,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.069.074.000,00	15.535.825.002,00	67,34	13.341.852.318,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	2.014.646.639.000,00	2.014.646.639.000,00	100,00	2.014.646.639.000,00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	1.832.868.643.660,00	1.784.401.030.483,00	97,36	1.699.580.667.857,00
4.2.2.	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>				
4.2.2.02	Dana Penyesuaian	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	100,00	50.348.952.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4.103.908.324.960,00</b>	<b>4.002.064.210.887,00</b>	<b>97,52</b>	<b>3.917.012.185.168,00</b>
4.3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
4.3.1.	Pendapatan Hibah	16.779.230.000,00	15.133.351.552,00	90,19	15.804.149.285,00
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>16.779.230.000,00</b>	<b>15.133.351.552,00</b>	<b>90,19</b>	<b>15.804.149.285,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.464.256.196.560,00</b>	<b>6.292.287.631.025,90</b>	<b>97,34</b>	<b>6.066.826.853.956,41</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>5.883.475.884.676,77</b>	<b>5.462.759.063.270,09</b>	<b>92,85</b>	<b>4.912.514.633.429,62</b>
5.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.146.259.588.404,77	2.052.591.375.029,00	95,64	2.024.083.087.285,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.578.175.470.499,00	1.437.979.483.800,94	91,12	1.216.893.627.987,46
5.1.3.	Belanja Bunga				
5.1.4.	Belanja Subsidi				
5.1.5.	Belanja Hibah	925.535.202.396,00	870.317.909.752,50	94,03	838.131.771.140,00
5.1.6.	Bantuan Sosial				
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>4.649.970.261.299,77</b>	<b>4.360.888.768.582,44</b>	<b>93,78</b>	<b>4.079.108.486.412,46</b>
5.2.	<b>BELANJA MODAL</b>				
5.2.1.	Belanja Tanah	20.367.436.430,00	5.264.294.425,00	25,85	271.462.061,00
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	423.894.139.471,00	377.650.635.457,54	89,09	230.427.833.027,16
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	378.667.770.514,00	337.196.129.558,00	89,05	308.779.364.240,00
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	348.506.869.065,00	327.467.595.267,11	93,96	276.798.925.142,00
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	56.448.275.870,00	52.122.753.706,00	92,34	15.899.783.347,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.227.884.491.350,00</b>	<b>1.099.701.408.413,65</b>	<b>89,56</b>	<b>832.177.367.817,16</b>
5.3.	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.621.132.027,00</b>	<b>2.168.886.274,00</b>	<b>38,58</b>	<b>1.228.779.200,00</b>
6	<b>TRANSFER</b>				
6.1.	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA</b>				
6.1.1.	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota	850.914.905.469,00	796.770.497.821,00	93,64	759.780.368.221,00
6.2.	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>				
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	158.412.212.000,00	5.000.000.000,00	3,16	58.319.000.000,00
6.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				27.615.000.000,00
6.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.846.670.000,00	2.846.670.000,00	100,00	1.589.390.750,00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.012.173.787.469,00</b>	<b>804.617.167.821,00</b>	<b>79,49</b>	<b>847.303.758.971,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>6.895.649.672.145,77</b>	<b>6.267.376.231.091,09</b>	<b>90,89</b>	<b>5.759.818.392.400,62</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT LRA</b>	<b>(431.393.475.585,77)</b>	<b>24.911.399.934,81</b>		<b>307.008.461.555,79</b>
7	<b>PEMBIAYAAN</b>				
7.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
7.1.1.	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	531.142.740.208,77	530.424.083.027,91	99,86	297.134.278.652,98
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan				
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>531.142.740.208,77</b>	<b>530.424.083.027,91</b>	<b>99,86</b>	<b>297.134.278.652,98</b>
7.2.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan				
7.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	53.430.000.000,00	53.430.000.000,00	100,00	73.000.000.000,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>53.430.000.000,00</b>	<b>53.430.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73.000.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>477.712.740.208,77</b>	<b>476.994.083.027,91</b>	<b>99,85</b>	<b>224.134.278.652,98</b>
	<b>SILPA PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>46.319.264.623,00</b>	<b>501.905.482.962,72</b>		<b>531.142.740.208,77</b>

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Sumatera Barat Tahun 2019

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DES 2019 DAN 2018

NO	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan 2019	REALISASI TAHUN 2019	%	REALISASI TAHUN 2018 (Audited)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1,821,885,000,000.00	1,872,933,990,718.00	102.80	1,797,677,158,644.95
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	19,752,130,696.00	19,475,962,399.00	98.60	19,506,412,108.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94,938,376,000.00	94,938,376,008.36		
4.1.3.	Lain-lain PAD yang Sah	439,355,030,134.00	341,084,544,560.81	77.63	81,374,332,350.87
4.1.4.					378,532,165,483.08
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2,375,930,636,830.00</b>	<b>2,328,432,873,686.19</b>	<b>98.00</b>	<b>2,275,090,068,586.90</b>
4.2.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan				
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak	116,171,233,900.00	79,695,674,963.00	68.60	116,230,716,402.00
4.2.1.02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	32,711,770,000.00	26,423,545,522.00	80.78	15,535,825,002.00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	2,076,368,191,000.00	2,076,368,191,000.00	100.00	2,014,646,639,000.00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	1,959,792,397,000.00	1,844,831,704,011.00	94.13	1,784,401,030,483.00
4.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
4.2.2.02	Dana Penyesuaian	18,319,448,000.00	18,319,448,000.00	100.00	71,250,000,000.00
4.2.4.	Bantuan Keuangan		1,210,800,000.00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4,203,393,039,900.00</b>	<b>4,046,879,363,496.00</b>	<b>96.28</b>	<b>4,002,064,210,887.00</b>
4.3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
4.3.1.	Pendapatan Hibah	26,468,569,000.00	15,024,967,402.00	56.77	15,133,351,552.00
4.3.1.	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus Bantuan Keuangan	1,210,800,000.00	-		
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>27,679,389,000.00</b>	<b>15,024,967,402.00</b>	<b>54.28</b>	<b>15,133,351,552.00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6,607,003,066,730.00</b>	<b>6,390,337,204,584.19</b>	<b>96.72</b>	<b>6,292,287,631,025.90</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>6,050,652,689,161.72</b>	<b>5,640,332,373,436.32</b>	<b>93.22</b>	<b>5,462,759,053,270.09</b>
5.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.1.	Belanja Pegawai	2,203,519,254,243.72	2,135,427,912,283.00	96.91	2,062,591,375,029.00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,614,496,304,206.00	1,502,334,501,682.30	93.06	1,437,979,483,800.94
5.1.3.	Belanja Bunga	166,000,000.00	-		
5.1.4.	Belanja Subsidi				
5.1.5.	Belanja Hibah	979,363,446,070.00	938,393,597,746.50	95.82	870,317,909,752.50
5.1.6.	Bantuan Sosial				
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>4,797,545,004,519.72</b>	<b>4,576,166,011,913.80</b>	<b>95.39</b>	<b>4,360,888,768,682.44</b>
5.2.	<b>BELANJA MODAL</b>				
5.2.1.	Belanja Tanah	19,893,130,469.00	10,156,972,298.06	51.06	5,264,294,425.00
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	357,401,886,276.00	306,583,492,565.45	85.78	377,650,635,457.54
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	530,250,055,616.00	435,842,685,679.79	82.20	337,196,129,658.00
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	284,976,036,161.00	256,937,694,133.22	90.16	327,467,565,267.11
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	57,332,808,100.00	52,709,608,358.00	91.94	52,122,753,706.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1,249,853,916,642.00</b>	<b>1,062,230,453,034.52</b>	<b>84.99</b>	<b>1,099,701,408,413.65</b>
5.3.	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3,153,768,000.00</b>	<b>1,945,908,488.00</b>	<b>61.70</b>	<b>2,168,886,274.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>3,153,768,000.00</b>	<b>1,945,908,488.00</b>	<b>61.70</b>	<b>2,168,886,274.00</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFER</b>				
6.1.	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA</b>				
6.1.1.	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota	890,618,226,744.00	877,337,840,199.00	98.51	796,770,497,821.00
6.2.	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>				
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	144,380,962,787.00	30,762,197,000.00	21.31	5,000,000,000.00
6.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
6.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2,846,670,000.00	2,846,670,000.00	100.00	2,846,670,000.00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>1,037,845,859,531.00</b>	<b>910,946,507,199.00</b>	<b>87.77</b>	<b>804,617,167,821.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>7,088,398,548,692.72</b>	<b>6,551,278,880,635.32</b>	<b>92.42</b>	<b>6,267,376,231,091.09</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT LRA</b>	<b>(481,395,482,962.72)</b>	<b>(160,941,676,051.13)</b>		<b>24,911,389,934.81</b>
<b>7</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
7.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
7.1.1.	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	501,905,482,962.72	502,062,672,840.72	100.03	530,424,083,027.91
7.1.2.	Pinjaman Dalam Negeri	74,381,000,000.00	61,712,000,000.00	82.97	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>576,286,482,962.72</b>	<b>563,774,672,840.72</b>	<b>97.83</b>	<b>530,424,083,027.91</b>
7.2.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
7.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20,510,000,000.00	20,413,100,000.00	99.53	53,430,000,000.00
7.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam negeri	74,381,000,000.00	54,028,000,000.00	72.64	
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>94,891,000,000.00</b>	<b>74,441,100,000.00</b>	<b>78.45</b>	<b>53,430,000,000.00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>481,395,482,962.72</b>	<b>489,333,572,840.72</b>	<b>101.65</b>	<b>476,994,083,027.91</b>
	<b>SILPA PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(0.00)</b>	<b>328,391,896,789.69</b>		<b>501,905,482,962.72</b>

GUBERNUR SUMATERA BARAT

*Irwan Prayitno*  
IRWAN PRAYITNO

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Sumatera Barat Tahun 2020



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020 (AUDITED)	%	REALISASI 2019 (AUDITED)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1,729,790,540,000.00	1,809,809,963,047.00	104.63	1,872,933,990,718.00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	8,533,127,076.00	7,926,595,873.00	92.89	19,475,962,399.00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103,900,375,092.00	94,747,256,568.00	91.19	94,938,376,008.38
4.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	332,391,102,929.00	342,589,169,939.41	103.07	341,084,544,560.81
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2,174,615,145,097.00</b>	<b>2,255,072,985,427.41</b>	<b>103.70</b>	<b>2,328,432,873,686.19</b>
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan				
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	148,686,257,850.00	127,288,301,588.00	85.61	79,695,674,963.00
4.2.1.02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	20,891,502,504.00	18,332,663,464.00	87.75	26,423,545,522.00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	1,901,922,227,000.00	1,891,323,979,000.00	99.44	2,076,398,191,000.00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	2,059,569,623,000.00	1,965,523,936,884.00	95.43	1,844,831,704,011.00
4.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus				
4.2.2.02	Dana Penyesuaian	44,421,312,000.00	44,421,312,000.00	100.00	18,319,448,000.00
4.2.4.	Bantuan Keuangan	4,566,800,000.00	4,566,800,000.00	100.00	1,210,800,000.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4,180,067,722,354.00</b>	<b>4,051,456,992,936.00</b>	<b>96.92</b>	<b>4,046,879,363,496.00</b>
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
4.3.1.	Pendapatan Hibah	67,141,884,185.00	57,535,777,881.00	85.69	15,024,967,402.00
4.3.2.	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus				
4.3.3	Bantuan Keuangan				
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>67,141,884,185.00</b>	<b>57,535,777,881.00</b>	<b>85.69</b>	<b>15,024,967,402.00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6,421,814,751,636.00</b>	<b>6,364,065,756,244.41</b>	<b>99.10</b>	<b>6,390,337,204,584.19</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>5,964,110,587,546.59</b>	<b>5,642,976,228,598.93</b>	<b>94.62</b>	<b>5,640,332,373,436.32</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.1.	Belanja Pegawai	2,084,203,083,110.83	2,053,063,431,421.80	98.51	2,135,427,912,283.00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,322,707,827,275.00	1,239,470,865,332.84	93.71	1,502,334,501,882.30
5.1.3.	Belanja Bunga	3,450,000,000.00	-	-	-
5.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.5.	Belanja Hibah	1,194,459,504,398.00	1,167,892,778,672.66	97.78	938,393,597,748.50
5.1.6.	Bantuan Sosial	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>4,604,820,414,783.83</b>	<b>4,460,427,075,427.30</b>	<b>96.86</b>	<b>4,576,156,011,913.80</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
5.2.1.	Belanja Tanah	9,794,555,500.00	9,308,412,702.00	95.04	10,156,972,298.06
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	170,738,525,705.00	165,593,262,548.00	96.99	306,583,492,565.45
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	461,813,835,540.00	383,074,734,460.91	82.95	435,842,685,679.79
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	148,389,790,184.00	137,602,274,994.72	92.73	256,937,694,133.22
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	59,493,735,675.00	41,309,676,009.00	69.44	52,709,608,358.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>850,230,442,604.00</b>	<b>736,888,360,714.63</b>	<b>86.67</b>	<b>1,062,230,453,034.52</b>
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>509,059,730,158.76</b>	<b>445,660,792,457.00</b>	<b>87.54</b>	<b>1,945,908,488.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>509,059,730,158.76</b>	<b>445,660,792,457.00</b>	<b>87.54</b>	<b>1,945,908,488.00</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFER</b>				
<b>6.1.</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA</b>				
6.1.1.	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota	764,437,559,739.00	764,437,559,739.00	100.00	877,337,640,199.00
6.1.2.	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota				
6.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/kota				



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



NO	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020 (AUDITED)	%	REALISASI 2019 (AUDITED)
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	1,658,501,140.00	880,000,000.00	53.06	30,762,197,000.00
6.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
6.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				2,846,670,000.00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>766,096,060,879.00</b>	<b>765,317,559,739.00</b>	<b>99.90</b>	<b>910,946,507,199.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>6,730,206,648,425.59</b>	<b>6,408,293,788,337.93</b>	<b>95.22</b>	<b>6,551,278,880,635.32</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT LRA</b>	<b>(308,391,896,789.59)</b>	<b>(44,228,032,093.52)</b>	<b>14.34</b>	<b>(160,941,676,051.13)</b>
<b>7</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>7.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
7.1.1.	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	328,391,896,789.59	332,762,656,299.59	101.33	502,062,672,840.72
7.1.2.	Pinjaman Dalam Negeri	73,335,500,000.00	4,723,000,000.00	6.44	61,712,000,000.00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>401,727,396,789.59</b>	<b>337,485,656,299.59</b>	<b>84.01</b>	<b>563,774,672,840.72</b>
<b>7.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
7.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	100.00	20,413,100,000.00
7.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam negeri	73,335,500,000.00	12,407,000,000.00	16.92	54,028,000,000.00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>93,335,500,000.00</b>	<b>32,407,000,000.00</b>	<b>34.72</b>	<b>74,441,100,000.00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>308,391,896,789.59</b>	<b>305,078,656,299.59</b>	<b>98.93</b>	<b>489,333,572,840.72</b>
	<b>SILPA PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>-</b>	<b>260,850,624,206.07</b>		<b>328,391,896,789.59</b>

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYBUDI

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta